



## Damkarmat Ajukan Penambahan Anggaran Rp 75 Juta

**JOGJA** - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jogja telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 75 juta melalui mekanisme APBD Perubahan 2026. Langkah tersebut diambil untuk mengatasi menipisnya anggaran operasional, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Damkarmat Kota Jogja Taokhid mengatakan, nilai anggaran yang diajukan merupakan estimasi kebutuhan operasional BBM untuk pelayanan kedaruratan hingga akhir tahun.

"Angka itu (Rp 75 juta) kalau persentase dibandingkan APBD murni kurang lebih di angka 60 persen, ini asumsi dari penghitungan ke-

kurangan dengan harga BBM posisi saat ini," ujar Taokhid di Balai Kota Jogja, kemarin (19/6).

Taokhid mengakui, dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi khususnya jenis Pertamina Dex menjadi beban tambahan bagi instansinya. Ini karena fluktuasi harga minyak membuat penghitungan kebutuhan operasional selama satu tahun di APBD murni meleset.

Di tengah kekurangan anggaran tersebut, dia menyatakan pemadam kebakaran saat ini juga lebih selektif dalam melakukan pelayanan. Sebagai upaya penghematan. Sebelum mendapat kucuran tambahan anggaran atau alokasi APBD Perubahan ditetapkan, pihaknya



gotong royong: Personel Damkarmat Kota Jogja menyempatkan air untuk membersihkan pedestrian Malioboro, Kota Jogja, beberapa waktu lalu.

akan lebih menitikberatkan pelayanan pada hal-hal yang bersifat kedaruratan. "Misalnya yang berkaitan dengan pemadaman api

dan penyelamatan jiwa," ujarnya. Sementara untuk pelayanan non-kedaruratan atau yang sebenarnya bukan menjadi tanggung

jawab pemadam kebakaran serta bisa ditangani masyarakat sendiri, petugas tidak serta-merta kemudian menolak permohonan. Namun masyarakat akan diberikan edukasi.

"Misal kaitannya dengan masalah sosial seperti urusan rumah tangga atau ulang tahun. Dulu sempat banjir (laporan) hal-hal seperti itu," bebarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Dhian Novitasari mendesak pemkot bisa mewujudkan pengajuan anggaran tambahan BBM di instansi tersebut. Pasalnya, pelayanan kedaruratan di dinas tersebut merupakan aspek pelayanan publik.

Bahkan jika memungkinkan, Politisi Partai Gerindra itu juga

mendorong agar pemkot menggeser alokasi anggaran yang sifatnya tidak mendesak. Seperti hibah pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Jogja yang batal dilakukan tahun ini.

"Jangan sampai kita membiarkan operasional pelayanan kemanusiaan terhambat, hanya karena kendala anggaran bahan bakar," tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyatakan, hal-hal yang bersifat kedaruratan tidak boleh dikesampingkan. Meskipun di tengah kenaikan harga BBM. Termasuk di dalamnya anggaran operasional mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan. **(inu/wia/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005